

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa;

1. Tahap Perencanaan keuangan pada Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka mulai dari RPJMDes, RKPDes dan APBDes secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Tahap Pelaksanaan keuangan pada Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka Belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dikarenakan penggunaan biaya tak terduga oleh Desa Naimana tidak melampirkan rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan Pemerintah Desa Naimana tidak menggunakan buku pembantu kas kegiatan.
3. Tahap Penatausahaan belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, karena penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Desa Naimana hanya menggunakan buku kas umum dan buku kas Bank.
4. Tahap Pelaporan keuangan Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sudah sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena Desa Naimana tidak mengalami keterlambatan pada saat pelaporan.
5. Tahap Pertanggungjawaban belum sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dikarenakan pada Desa Naimana hanya tersedia papan

pengumuman untuk menginformasikan tentang realisasi APBDesa dan Desa Naimana hanya mempunyai Format rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, rancangan anggaran biaya, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan laporan realisasi pelaksana APBDesa pada semester akhir.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka terkait pengelolaan keuangan desa

- a. Pemerintah Desa perlu mengupayakan agar mempunyai buku kas pembantu pajak,
- b. Pemerintah Desa perlu menyediakan sarana informasi seperti radio komunitas, dan media informasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Hendro Pujo Sasongko, (2013). *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggorong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No.4 (<http://ejournal.ip.fisip-Punmul.ac.id>, diakses 8 Des 2016)
- Ardi, Hamzah. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Febrian. (2014). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012*. Jom FISIP Volume1 No 2- Oktober2014(<http://jom.unri.ac.id/index/php/JOMESIP/article>, diakses 13 Desember 2016)
- Puspitasari, Cendri Junior. (2018) *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi di Desa Guci Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim)*
- Pradana, Heribertus Yudha. (2018). *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo*.
- Hoesada, Dr. Jan. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia, Dadang. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Murnawati, Lin. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raju Kabupaten Ogan Ilir)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia